

ABSTRAK

Peraturan dan norma-norma yang dibuat agar setiap warga negara Indonesia sadar dan taat akan hukum, dengan adanya peraturan atau norma-norma hukum yang baru dapat memicu adanya kejahatan disinilah peran aparat pemerintah dan instansi yang mempunyai wewenang serta tanggung jawab nyata untuk tegaknya suatu hukum dengan melakukan peningkatan kinerja dan melayani masyarakat untuk menciptakan stabilnya hukum dan hukum yang adil di Negara. Perbuatan penganiayaan dan penyiksaan yang masuk dalam kategori perbuatan main hakim sendiri dan melawan hukum yang berlaku, seperti kasus percobaan pemerkosaan yang mengakibatkan tersangka yang berinisial AK meninggal dunia lantaran diamuk massa setelah mendengar teriakan dari IR yang menjadi korban dari Ak. Kasus serupa juga terjadi di NTT yang melibatkan anak dibawah umur.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. menggunakan metode pendekatan perundang-undangan(*statue approach*)dan konseptual (*conceptual approach*). yang dimaksud pendekatan perundang-undangan adalah penelitian yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang tengah diteliti. sedangkan pendekatan konseptual merupakan yang memberikan pandangan untuk menganalisa dan menyelesaikan masalah hukum dengan melihat aspek konsep hukum.

Perbuatan main hakim sendiri yang mengakibatkan luka atau hilangnya nyawa dari seseorang dapat terlepas dari jeratan hukum apabila dalam unsur perbuatannya memenuhi syarat dari hapusnya suatu pidana yaitu dari alasan pembenar dan alasan pemaaf yang ketentuan nya tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mulai dari pasal 48 sampai dengan pasal 51 KUHP.

Kata kunci; main hakim sendiri, penganiayaan, penghapusan pidana.

ABSTRACT

Regulations and norms that are made so that every Indonesian citizen is aware of and obeys the law, with the existence of new regulations or legal norms that can trigger crime, this is where the role of government officials and agencies has real authority and responsibility for the enforcement of a law. improve performance and serve the community to create a stable law and fair law in the country. Acts of mistreatment and torture that fall into the category of vigilante acts and against the applicable law, such as the case of attempted rape which resulted in the suspect with the initials AK dying due to a mob after hearing screams from IR who was the victim of Ak. A similar case also occurred in NTT involving minors. The research method used in this research is normative legal research. using the method of approach to legislation (statue approach) and conceptual (conceptual approach). what is meant by the statutory approach is research conducted by reviewing all laws and regulations relating to the legal issue being studied. while the conceptual approach is one that provides views for analyzing and resolving legal problems by looking at aspects of legal concepts.

The act of vigilantism that results in injury or loss of life of a person can be released from legal bondage if the elements of the act meet the requirements of the abolition of a crime, namely from reasons of justification and reasons for forgiveness whose provisions are contained in the Criminal Code starting from article 48 to with Article 51 of the Criminal Code.

Keywords; vigilantism, persecution, criminal abolition.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN HALAMAN SAMPUL DALAM	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO	iv
HALAM PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	3
1.3. Tujuan Penelitian	3
1.4. Kegunaan Penelitian	4
1.4.1. Kegunaan Teoritis	4
1.4.2. Kegunaan Praktis	4
1.5. Keaslian Penelitian	4
1.6. Metode Penelitian	6
1.6.1. Jenis Penelitian.....	6
1.6.2. Metode Pendekatan	7
1.6.3. Sumber Bahan Hukum	7
1.6.4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	8
1.6.5. Metode Analisis data.....	9
BAB II TINJAUAN PUSTAKA HAPUSNYA PEMIDANAAN TERHADAP	
PELAKU TINDAK PIDANA MAIN HAKIM SENDIRI DALAM KASUS	
PERCOBAAN PEMERKOSAAN	10
2.1. Tinjauan umum tindak pidana.....	10
2.1.1 definisi tindak pidana	10
2.1.2 tindak pidana main hakim sendiri	14

2.2. Alasan penghapusan pidana	13
2.2.1 Alasan pembenar	15
2.2.2 Alasan pemaaf	16
BAB III AKIBAT HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA MAIN	
HAKIM SENDIRI DALAM KASUS PERCOBAAN PEMERKOSAAN	
.....	28
3.1 Unsur tindak pidana main hakim sendiri	28
3.2 Unsur alasan penghapusan pidana	38
BAB IV PENUTUP	54
4.1.Simpulan	54
4.2.Saran	55
DAFTAR PUSTAKA	56
LAMPIRAN	58